



Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Andhika Nurul Wahidah^{1*}, Sandy Leo¹, Vinca R.Y.¹, Rani Gustia¹

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

*Correspondence: andhika.nurul@ui.ac.id

Disetujui: Januari, 2024

ABSTRAK

Pendahuluan: Keberadaan ibukota negara tentu akan memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Kalimantan timur dengan mengkaji bagaimana pendapatan daerah, pengelolaan sumber daya dan perubahan infrastruktur. **Temuan:** Pemindahan ibukota negara (IKN) akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan keseluruhan secara signifikan. Fasilitas sarana dan prasarana yang akan dibangun menjadi tolak ukur dari nilai indeks pembangunan manusia. Pendapatan daerah pun diprediksi akan semakin tinggi dikarenakan adanya pusat-pusat perekonomian dan bisnis baru yang akan dibangun untuk menunjang mobilitas dan perekonomian ibukota negara. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembangunan ibukota negara menjadi parameter dan tolak ukur perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan dan kemajuan pun akan dirasakan oleh seluruh daerah.

KATA KUNCI: ibukota negara; indeks pembangunan manusia; Kalimantan Timur.

ABSTRACT

Introduction: The existence of the national capital will certainly have a major influence on the growth of the Human Development Index, especially in East Kalimantan and Kalimantan as a whole. **Methods:** This research uses a systematic literature method. This study aims to estimate the effect of relocating the national capital on the human development index in East Kalimantan province by examining how regional income, resource management and infrastructure changes. **Findings:** The relocation of the national capital (IKN) will significantly increase the value of the human development index (HDI) of East Kalimantan Province and Kalimantan as a whole. The facilities and infrastructure that will be built become a benchmark for the value of the human development index. Regional income is also predicted to be higher due to new economic and business centers that will be built to support the mobility and economy of the national capital. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the development of the national capital is a parameter and benchmark for the development and progress of East Kalimantan Province. Development and progress will also be felt by all regions.

KEYWORDS: national capital; east kalimantan; human development index.

1. Pendahuluan

Sebagai kawasan terluas urutan keempat di Indonesia, Kalimantan Timur menyimpan potensi sumber daya alam yang berlimpah, khususnya pada bidang kehutanan dan pertambangan. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya energi berupa batubara, minyak bumi dan gas bumi. Sektor tambang dan migas berkontribusi besar dalam pertumbuhan

Cite This Article:

Wahidah, A. N., Leo, S., Y, V. R., Gustia, R. (2024). Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal*, 1(1), 11-16. <https://doi.org/10.61511/sudeij.v1i1.2024.632>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



ekonomi di wilayah ini. Provinsi ini juga mengembangkan sektor pertanian untuk mendukung perekonomian daerah. Secara geografis, luas daratan provinsi ini adalah sebesar 127.346,92 km²; secara administratif terbagi atas 10 kabupaten dan Kota (Apriyani, 2018). Secara topografis, Kalimantan Timur pada umumnya berupa perbukitan, dengan ketinggian 0-2500 meter di atas permukaan laut. Provinsi ini termasuk salah satu yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan beriklim tropis, maka kelembaban udara dan curah hutannya relatif tinggi.

Dalam hal kependudukan, jumlah penduduk Kalimantan Timur adalah 3.721.389 jiwa yang tersebar 54,17% di 7 kabupaten dan 45,83 % di 3 kota (tabel 1). Pertumbuhan penduduk memiliki laku sebesar 1,99% pada tahun 2019 (tabel 2).

Tabel 1. Proyeksi pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur (2014-2020)

Kabupaten/kota	Proyeksi penduduk kabupaten/kota (perempuan+laki-laki) (jiwa)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	256175	262301	268261	274206	279975	285894	291573
Kutai Barat	144892	145838	146307	146998	147598	148020	148278
Kutai Kartanegara	700439	717789	735016	752091	769337	786122	802903
Kutai Timur	306974	320115	333591	347468	361670	376111	390991
Berau	203223	208893	214828	220601	226509	232287	238214
PPU	152119	154235	156001	157711	159386	160912	162518
Mahakam Ulu	25894	25970	26089	26305	26347	26375	26485
Balikpapan	605096	615574	625968	636012	645727	655178	664201
Samarinda	797006	812597	828303	843446	858080	872768	886806
Bontang	159614	163326	166868	170611	174206	177722	181183
Kalimantan Timur	3351432	3426638	3501232	3575449	3648835	3721389	3793152

Sumber: (BPS Kalimantan Timur, 2019)

Tabel 2. Laju pertumbuhan penduduk di tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (2014-2020)

Kabupaten/kota	Laju pertumbuhan penduduk (perempuan+laki-laki) (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	2.47	2.39	2.27	2.22	2.10	2.11	1.99
Kutai Barat	0.61	0.65	0.32	0.47	0.41	0.29	0.17
Kutai Kartanegara	2.53	2.48	2.40	2.32	2.29	2.18	2.13
Kutai Timur	4.34	4.28	4.21	4.16	4.09	3.99	3.96
Berau	2.96	2.79	2.84	2.69	2.68	2.55	2.55
PPU	1.27	1.39	1.15	1.10	1.06	0.96	1
Mahakam Ulu	0.84	0.29	0.46	0.83	0.16	0.11	0.42
Balikpapan	1.81	1.73	1.69	1.60	1.53	1.46	1.38
Samarinda	2.05	1.96	1.93	1.83	1.74	1.71	1.61
Bontang	2.40	2.33	2.17	2.24	2.11	2.02	1.95
Kalimantan Timur	2.31	2.24	2.18	2.12	2.05	1.99	1.93

Sumber: (BPS Kalimantan Timur, 2019)

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk terbanyak berada di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, dengan pertumbuhan yang relatif menurun dari tahun ke tahun. Tingginya kepadatan penduduk di kota pada umumnya karena memiliki posisi sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Distribusi penduduk yang tidak merata dapat mengakibatkan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan akses pelayanan dengan menyediakan konektivitas antar wilayah. Penyediaan fasilitas, lapangan pekerjaan dan infrastruktur harus menjadi perhatian agar terwujud keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial sebagai dampak dari ketidakseimbangan roda perekonomian dan pembangunan.

Kalimantan Timur memiliki keunggulan berupa kekayaan alam yang melimpah sehingga bisa meningkatkan daya saing wilayah. Aspek daya saing atau komparasi kesejahteraan kerap dihitung berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM), utamanya kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. IPM berperan signifikan untuk menentukan berhasil-tidaknya pembangunan kualitas manusia, yang dapat mendeterminasikan capaian pembangunan sebuah wilayah. Dalam dunia politik IPM dapat memberikan rekomendasi kebijakan publik yang dapat mengarahkan pada peningkatan kehidupan, pilihan dan kapasitas masyarakat di suatu wilayah (Freire *et al.*, 2018). IPM adalah standar alternatif untuk pengukuran konvensional pembangunan ekonomi dan merupakan perspektif global bagaimana masyarakat hidup (Martínez-Guido *et al.*, 2019). Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan faktor risiko kesehatan seperti gaya hidup, nutrisi, dan lain-lain, sehingga berpengaruh terhadap masa depan, yaitu penundaan morbiditas dan risiko kecacatan yang lebih kecil (Freire *et al.*, 2018). Masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik akan berdampak terhadap intensifikasi produktivitas kerja sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian.

IPM mulanya digagas oleh United Nations Development Program pada 1990, di mana konsep pembangunan manusia lebih menonjolkan keberadaan manusia sebagai penerima manfaat pembangunan bukan hanya sekedar sebagai sarana mencapai tujuan (Qiu *et al.*, 2018). Konsep pembangunan manusia mencerminkan manusia bukan hanya alat, melainkan juga tujuan utama dari proses sosial ekonomi (Yakunina & Bychkov, 2015). Menurut INDP (2019), IPM merupakan indeks kombinasi untuk mengukur rata-rata capaian pembangunan manusia dalam tiga aspek: kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak. Indikator aspek pertama adalah angka harapan hidup ketika lahir; indikator aspek kedua adalah lama masa sekolah bagi subjek yang berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah bagi anak-anak; indikator aspek ketiga adalah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Parameter-parameter itu dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan dapat mencerminkan statusnya. Logaritma pendapatan digunakan oleh UNDP untuk menggambarkan makin urgennya pendapatan dengan peningkatan PNB. Nilai tiga aspek IPM, selanjutnya, dihimpun dalam indeks kombinasi menggunakan rata-rata geometris. Perbedaan antara metode IPM UNDP dan IPM BPS ada pada nilai minimum dan maksimum dimensi standar hidup layak dimana UNDP menggunakan indikator PNB perkapita (PPP US\$) sementara IPM BPS menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp). Pengeluaran per kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (BPS, 2019).

IPM Kalimantan Timur termasuk tinggi di Indonesia, namun jika dilihat antar kabupaten/ kota tampak adanya kesenjangan IPM, yang mengimplikasikan bahwa daya saing sumber daya manusia (SDM) belum maksimal secara total. Persoalan yang amat menentukan daya saing tersebut adalah ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat berdampak pada jumlah pengangguran terbuka sehingga menyebabkan disparitas pendapatan. Ketidakteraturan pendapatan menyebabkan adanya kesenjangan kemakmuran antar anggota masyarakat. Gap pembangunan antarkabupaten/kota umumnya terjadi karena sumber daya alam, demografi, pemusatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan berbeda satu sama lain. Dengan adanya tingkat perbedaan pembangunan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya akan mempengaruhi keseimbangan aktifitas perekonomian dan akan

menyebabkan ketimpangan kesejahteraan antar daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk pemeratakan pembangunan antar daerah agar pembangunan menyeluruh dapat tercapai secara, baik secara regional maupun nasional (Yuliani, 2014). Pemerataan pembangunan yang perlu ditingkatkan terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terutama untuk wilayah dengan IPM rendah.

Adanya rencana pemindahan ibukota Negara (IKN) ke provinsi Kalimantan Timur akan menyebabkan pertumbuhan penduduk di wilayah itu dan hal tersebut tentu akan mempengaruhi peningkatan aktifitas perekonomiannya. Pemindahan itu diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa pemerataan ekonomi masyarakat karena penyebaran penduduk tidak lagi terpusat pada satu wilayah saja. Meningkatnya produktivitas dan berkembangnya infrastruktur akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, dimana produktivitas akan berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja sementara pengembangan infrastruktur akan dikaitkan dengan sanitasi, ketersediaan air bersih, jalan, teknologi informasi dan komunikasi dan lain-lain (Rasoolimanesh *et al.*, 2019). Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan kondisi *existing* daerah itu dengan segala sumber daya dan tata kelola yang dimiliki agar dapat mendukung fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Membangun perekonomian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang nantinya ditimbulkan akibat pengembangan wilayah maka akan berkorelasi dengan peningkatan pembangunan manusianya. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemerataan pendapatan akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat produktivitas. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana potensi yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur saat ini dan kemungkinan pengaruhnya terhadap pembangunan manusia jika Ibukota negara dipindahkan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan sumber pustaka ke dalam beberapa jenis, yakni buku, jurnal, artikel prosidin, dan olah data statistik. Data statistik ini merupakan data resmi yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik. Untuk proses analisis hasil, dilakukan melalui metode analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Kalimantan timur dengan mengkaji bagaimana pendapatan daerah, pengelolaan sumber daya dan perubahan infrastruktur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendapatan daerah Kalimantan Timur terhadap indeks pembagunan manusia

Pemerintah provinsi dan daerah Kalimantan Timur memprioritaskan sektor perminyakan dan pertambangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sektor perminyakan dan pertambangan di Kalimantan Timur telah ada sejak zaman kolonial di kawasan yang kini menjadi Kota Balikpapan. Tunas Nusa Edu-Foundation (2018) menjelaskan bahwa Kota Balikpapan berkembang setelah ditemukannya sumur minyak "Mathilda" di teluk Balikpapan pada 10 Februari 1897 di kaki Gunung Komendur. Tanggal ini kemudian menjadi peringatan lahirnya Kota Balikpapan. Kemunculan sumur bor lainnya di awal tahun 1900 kemudian mendatangkan banyak pekerja dari luar kota Balikpapan yang umumnya dari Jawa, Cina, dan India. Pedagang dari Sulawesi seperti Bandar dan Bone juga mulai berdatangan. Merekalah yang menjadi asal usul sebagian besar penduduk Balikpapan.

Dengan minyak bumi sebagai sumber daya utama, Balikpapan menjadi kota industri minyak dan terus menyebar ke kawasan lain yang kemudian berkembang menjadi kota baru. Balikpapan tidak hanya menjadi pusat pengeboran melainkan pengelolaan dan

pengolahan minyak (Susanto, 2011). Industri minyak yang beroperasi dan berkembang di Kalimantan Timur tidak hanya oleh perusahaan asing, tapi juga perusahaan negara. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan batu bara di Kalimantan Timur.

Pascaera minyak, Kalimantan Timur secara dominan diramaikan dengan aktivitas tambang minyak bumi dan batu bara. Cadangan sumber daya alam berupa energi fosil Kalimantan Timur menjadi salah satu yang eksploitasinya terbesar di Indonesia. Ini yang menjadikan batu bara sebagai pusat dari kebijakan energi Indonesia sejak akhir 1970-an hingga saat ini sebagai salah satu sumber pembangkit tenaga listrik nasional. Kalimantan Timur dengan luas 12,7 juta hektar, 5,2 juta hektar (46%) dialokasikan untuk penambangan dengan jumlah izin penambangan mencapai 1400 (Hadi *et al.*, 2018).

Selain sumber daya minyak dan batu bara yang melimpah, Kalimantan Timur juga memiliki hutan yang dimanfaatkan untuk kayu bulat (*log*), karet, lada, dan kelapa sawit. Namun kemudian, terjadi deforestasi secara masif di Kutai Kartanegara pada 1970-1990an. Saat itu, rezim Orde Baru mengimplementasikan intensifikasi pembangunan nasional melalui penggunaan sumber daya alam. Salah satu yang ditumakan ialah pemberian konsesi hutan bagi pihak swasta dan perusahaan negara. Kebutuhan tenaga kerja tambahan untuk industri penebangan kayu juga membuat tenaga kerja dari Jawa dan Bali didatangkan melalui proses transmigrasi di era tersebut. Namun, eksploitasi hutan yang massif menurunkan produktivitas industri kayu sehingga komoditi kayu hutan berubah mejadi karet dan lada di tahun 1995 (Yulian *et al.*, 2017). Sejak krisis moneter, banyak perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang bangkrut dan melemahkan industri hasil hutan. Selanjutnya, pada 2005-2007, pemerintah provinsi Kalimantan Timur mengadakan pembukaan lahan perkebunan sawit di beberapa kabupaten lewat program sawit sejuta hektar (Amalia *et al.*, 2019).

Besarnya andil industri minyak, batu bara, dan perkebunan membuat rantai ketergantungan ekonomi masyarakat lokal dan ekonomi global sangat kuat. Industri sumberdaya fosil menjadi bahan perdagangan luar negeri yang strategis dan utama. Di Kalimantan Timur, pertambangan batu-bara berkontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2017 (Arinaldo, 2019). Dengan penambahan gas dan minyak, jumlahnya mencakup setengah PDB provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur juga termasuk tinggi, yaitu sebesar 51% walaupun hasil pengelolaan kekayaan daerah Kalimantan Timur hanya menyumbang 15% PAD (Katadata, 2019). Data ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur bersandar pada hasil industri sumberdaya fosil untuk bahan bakar. Pada dasarnya, jika kontribusi PAD terhadap anggapan pendapatan dan belanja daerah (APBD) makin besar, maka ketergantungan daerah kepada pusat makin kecil, begitu pula sebaliknya (Hibzon, 2007).

Kondisi keunagan daerah ditinjau dari pendapatan dan pengeluaran daerah. Pembiayaan ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi di daerahnya. Pemerintah perlu mengenali kondisi lingkungan ekonomi dengan baik untuk menentukan arah pengeluaran pemerintah secara tepat sehingga sasaran yang dipilih sejalan dengan keinginan pemerintah (Hibzon, 2007). Pengeluaran harus diminimalkan, sedangkan penerimaan harus dimaksimalkan karena seiring dengan peningkatan pendudukan dan kebutuhan, aktivitas dan kebutuhan pemerintah juga meningkat, demikian sebaliknya. Maka dari itu, peningkatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kalimantan Timur untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan dana daerah sendiri.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur menempati peringkat ketiga dari 34 provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta (BPS, 2019). Ini menjadi yang tertinggi di seluruh Kalimantan terlihat dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam bentuk pengeluaran per kapita. Berdasarkan data dari BPS secara keseluruhan IPM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 adalah 75,83 dengan IPM tertinggi terdapat pada wilayah perkotaan yaitu Samarinda, Bontang dan Balikpapan sementara Kabupaten Mahakam Ulu memiliki IPM terendah dengan nilai 66.67 (tabel 3).

Tabel 3. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Paser	66.54	67.11	68.18	69.61	69.87	70.30	71	71.16	71.61
Kutai Barat	65.90	66.92	67.14	68.13	68.91	69.34	69.99	70.18	70.69
Kutai Kartanegara	67.45	68.47	69.12	70.71	71.20	71.78	72.19	72.75	73.15
Kutai Timur	66.94	67.73	68.71	69.79	70.39	70.76	71.10	71.91	72.56
Berau	69.16	70.43	70.77	72.02	72.26	72.72	73.05	73.56	74.01
PPU	66.37	66.92	67.17	68.07	68.60	69.26	69.96	70.59	71.13
Mahakam Ulu	-	-	-	63.81	64.32	64.89	65.51	66.09	66.67
Balikpapan	75.55	76.02	76.56	77.53	77.93	78.18	78.57	79.01	79.81
Samarinda	75.85	77.05	77.34	77.84	78.39	78.69	78.91	79.46	79.93
Bontang	76.97	77.25	77.55	78.34	78.58	78.78	78.92	79.47	79.86
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	75.83

Sumber: (BPS Kalimantan Timur, 2019)

Perekonomian Kalimantan Timur disokong oleh sektor pertambangan batu-bara, gas alam, dan minyak bumi. Jadi, penurunan sektor-sektor ini berimplikasi terhadap sektor-sektor lainnya, terutama perdagangan dan jasa, yang pada gilirannya memengaruhi kondisi ekonomi provinsi. Sementara itu, kehutanan, dalam hal ini kawasan hutan produksi, belum dimanfaatkan secara optimal. Demikian pula, sektor agrikultur (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutan) masih menjadi sektor primer. Adapun Crude Palm Oil (CPO) contoh olahan hasil perkebunan, yakni sawit.

Pada dasarnya pola pertumbuhan di Indonesia dimulai dari kota menuju ke desa, termasuk dalam perkembangan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Menurut Harahap (2013), urbanisasi di Indonesia, yang telah berlangsung sejak Orde Baru, menimbulkan sejumlah dampak, seperti (1) kebijakan ekonomi makro (1967-1980) yang menempatkan kota sebagai sentral ekonomi, (2) konsentrasi pembangunan di Jakarta akibat kebijakan penggantian impor dan investasi asing pada sektor manufaktur, serta (3) keengganan kaum muda untuk bekerja pada sektor pertanian akibat mekanisasi yang masif pada awal 1980-an. Pola pertumbuhan ini akan berkaitan dengan nilai IPM per kapita di perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten.

Sebagai kawasan yang akan menjadi rencana pemindahan IKN, struktur perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi sektor pertambangan dan penggalian sumber daya batu bara. Kedepannya, struktur perekonomian di kedua kabupaten akan bertambah dengan adanya pemindahan IKN karena walaupun terletak di kabupaten, IKN hanya berjarak 30 menit dari Balikpapan dan 45 menit dari Samarinda. Akses Lokasi IKN yang bisa ditempuh dari dua kota besar Kalimantan Timur, yaitu Samarinda dan Balikpapan, maka akan sangat mempengaruhi ketergantungan terhadap kedua kota tersebut selama pembangunan IKN hingga IKN sudah beroperasi. Karena kedua kota tersebut sejak dulu sudah menjadi poros utama perekonomian kaltim dan akan semakin besar pengaruhnya untuk menopang IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan.

Samarinda dan Balikpapan yang berada di pesisir pantai dan tepi sungai sangat strategis sebagai aksesibilitas transportasi kargo penyedia kebutuhan provinsi ditambah lagi dengan adanya fasilitas transportasi bandara internasional di kedua kota dan rencana pembangunan tol Balikpapan-Samarinda. Hal ini akan memperkuat perkembangan kedua kota menjadi megaurban baru di Indonesia dengan peningkatan IPM yang signifikan dibandingkan kabupaten lainnya. Bahkan Samarinda dan Balikpapan juga perlu

mempertimbangkan daya dukung kotanya sejak sekarang demi menopang pembangunan yang akan lebih pesat dari sebelumnya. Ketimpangan ini menjadi tantangan baru dalam menyusun strategi pemerataan IPM di Indonesia melalui aksesibilitas infrasturktur.

3.2 Perubahan infrastruktur terhadap pembangunan daerah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pembangunan suatu daerah akan tertinggal manakala daerah tersebut defisit sumber daya manusia dan alam serta insentif, seperti sarana prasarana, infrastruktur, dan perangkat (Azis, 1994). Pemerintah memang telah mengalokasikan berbagai modal (fiskal, tenaga, dan waktu) untuk membangun daerah-daerah di Indonesia. Namun, masih terjadi disparitas pembangunan antarwilayah, yang mengimplikasikan diferensiasi kecepatan satu sama lain (Widayati, 2017).

Kalimantan Timur menerima dana bagi hasil sumber daya alam terbesar pada 2018, yaitu Rp10,21 triliun menurut data Kementerian Keuangan. Nilai ini lebih besar daripada penerimaan Jawa Timur (Rp6,07 triliun), Sumatera Selatan (Rp4,7 triliun), dan Papua (Rp3,2 triliun) (Kusnandar, 2019). Akan tetapi, penerimaan yang besar ini tidak sebanding dengan kesejahteraan bagi masyarakat provinsi tersebut karena dalam hal ekonomi dan pembangunan (fisik dan nonfisik), nilai provinsi ini jauh di bawah rata-rata nasional; hal ini terlihat dari aspek infrastruktur jalan, aksesibilitas kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa yang buruk dan bahkan tidak ada (Saragih, 2018).

Kekayaan alam Kalimantan Timur belum dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, sebagaimana tampak dari banyaknya pengangguran, keluarga miskin, dan ketimpangan antardaerah (Mubyarto, 2005). Selain itu, indeks eksploitasi ekonomi juga teta tinggi sejak 1996—2002, yakni 90%, yang sebelumnya 89%. Eksploitasi ekonomi dalam hal ini merujuk pada tindakan pemerintah pusat atau investor asing, yang dihitung dengan melakukan komparasi antara PDRB per kapita dan pengeluaran konsumsi per kapita. Adapun provinsi ini tergolong dalam 12 provinsi yang memiliki indeks eksploitasi ekonomi tinggi, sejajar dengan Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Riau (Kuncoro & Idris, 2015).

Infrastruktur bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena berperan penting untuk meningkatkan investasi dan memperluas cakupan partisipasi masyarakat dan hasil pembangunan. Demikian pula, menurut Sina & Farida (2018), kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan. Hal ini dibenarkan oleh Warsilan & Noor (2015) dalam risetnya mengenai implikasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Infrastruktur kesehatan yang lengkap dan baik di kota tersebut akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pelayanan air bersih juga berperan penting dalam hal ini. Makin baik layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat, maka ekonomi makin bertumbuh. Yang berdampak signifikan berikutnya adalah infrastruktur jalan. Secara teoretis, infrastruktur ini berarti vital dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi karena jalan melancarkan mobilitas masyarakat dan arus barang sehingga pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Dalam pembangunan infrastruktur ini, sasaran utama yang harus dituju adalah upaya penyerapan tenaga kerja melalui penambahan panjang jalan, kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi lewat penambahan fasilitas jalan, dan terakhir, pengurangan kemiskinan lewat penambahan panjang jalan.

Pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan akan berdampak baik bagi pemerintah dan masyarakat, yakni PDRB meningkat bila ditinjau dari sektor pembangunan, industri, dan sejumlah sektor lain. Menurut lapangan usaha, pada 2010—2015, nilai rata-rata PDRB adalah sebesar 2,95%. Nyaris seluruh sektor ekonomi di provinsi Kalimantan Timur mengalami akselerasi nilai PDRB, yakni Kutai Kertanegara sebesar Rp127,4 triliun, Kuta Timur sebesar Rp62,4 triliun, dan Bontang sebesar Rp61,51 triliun. Sementara itu,

pertumbuhan ekonomi tertinggi berdasarkan kabupaten/kota pada 2010—2015 terdapat di Kabupaten Paser (8,18%), Berau (7,39%), dan Kutai Timur (6,95%) (Sina & Farida, 2018).

Prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah pengembangan transportasi jalan. Namun, hal ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Sebagai bukti, indeks aksesibilitas memperlihatkan bahwa hanya 4 dari 13 kota yang berkategori baik. Adapun indeks ini merupakan tolok ukur kemudahan akses untuk melakukan perpindahan dari titik asal ke titik tujuan serta menggambarkan daya tarik di sebuah wilayah dan kemudian untuk mencapai wilayah tersebut.

Tabel 4. Indeks aksesibilitas wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Aksesibilitas	Kategori
1	Paser	0,237883	Cukup
2	Kutai Barat	0,019818	Kurang
3	Kutai Kartanegara	1,299308	Baik
4	Kutai Timur	0,770975	Cukup
5	Berau	0,062629	Cukup
6	Malinau	0,012675	Kurang
7	Bulungan	0,020887	Cukup
8	Nunukan	0,014543	Kurang
9	Penajam Paser Utara	1,344444	Baik
10	Balikpapan	1,84225	Baik
11	Tarakan	0,053351	Cukup
12	Bontang	0,367347	Cukup
13	Samarinda	2,9369	Baik

Sumber: (Sitorus et al., 2017)

Adapun perbandingan panjang jalan atas wilayah bernilai relatif kecil, yakni 52,53 km per km². Selain itu, jaringan jalan yang masih minim berpengaruh terhadap akselerasi perkembangan wilayah dan upaya menunjang potensi daerah. Akibatnya, pelayanan jaringan transportasi jalan mengalami keterbatasan. Semua daerah utara dan barat, perbatasan dan pedalaman, belum terjangkau dalam penyaluran barang dan komoditas utama di berbagai daerah kabupaten/kota. Jaringan yang ada juga perlu ditingkatkan agar terpadu dengan moda transportasi yang sudah ada sampai sekarang. Dalam konteks ini, harapannya, perekonomian masyarakat Kalimantan Timur dapat disokong dengan peran pelayanan, jaringan, dan simpul transportasi yang dikembangkan dan ditingkatkan (Sitorus et al., 2017).

Menurut Zaini (2017), distribusi merupakan salah satu fungsi yang belum sukses dijalankan oleh Kalimantan Timur. Anggaran yang telah dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur relatif tidak berimpak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Pengeluaran pemerintah secara positif sejalan dengan gap pendapatan akibat pembangunan yang kurang merata. Pengaruh PDRB per kapita atas gap pendapatan yang tidak signifikan bisa diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi provinsi ini yang secara dominan ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Maka dari itu, sektor lain perlu dikembangkan sebagai mesin penggerak ekonomi pada masa mendatang. Misalnya, pertanian menjadi sektor alternatif bagi pembangunan masa depan. Walaupun penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak berdampak vital terhadap pemerataan pendapatan, ada tendensi bahwa sektor ini bisa memperbaiki distribusi pendapatan. Masyarakat Kalimantan Timur sebagian besar bermata pencarian pada sektor pertanian sehingga sektor ini vital bagi kesejahteraannya secara luas. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor ini untuk lebih berorientasi pada pasar dan industri sehingga lebih produktif. Dengan demikian, perbaikan distribusi pendapatan di provinsi ini bisa dicapai. Adapun program perkebunan kelapa sawit tetap perlu diteruskan dengan menyediakan infrastruktur pendukung sehingga bernilai tambah bagi perekonomian.

Potensi sumber daya alam yang tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat memicu perdebatan tentang isu sentral kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Fakta menunjukkan bahwa dampak nyata pengelolaan sumber daya alam di provinsi ini adalah degradasi lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah provinsi sebagai koordinator antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum menampakkan kehadirannya. Maka dari itu, diperlukan atensi terhadap potensi sumber daya alam yang khas, seperti tambang, perkebunan, dan hutan, sehingga kewenangan yang diberikan tepat sasaran dan terhindar dari konflik kepentingan. Selain itu, diperlukan kewenangan yang tegas dan nyata bagi pemerintah provinsi untuk mengelola sumber daya alam, utamanya dalam pemberian izin dan penentuan kawasan pengelolaan yang melampaui batas administratif kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya berwenang secara teknis dalam pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, diperlukan riset lanjutan mengenai implementasi fungsi koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, tepatnya pengelolaan sumber daya alam (Barlian, 2012).

Rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur juga memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam serta perusakan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. dalam “Dialog Nasional Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara” menyampaikan tiga konsep pengembangan ibu kota negara dari aspek lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain kemudahan pembangunan ibu kota negara, minimalisasi dampak terhadap lingkungan hidup, dan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur harus yang ramah lingkungan (efisiensi terkait dengan emisi, air dan energi). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus mempertahankan Kawasan Hutan tertentu di dalam dan sekitar ibu kota negara yang berfungsi sebagai Sistem Penyangga Kehidupan. Selama proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam ibu kota negara wajib menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keberlanjutan (Nurbaya, 2019; Safutra, 2019).

3.3 Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur telah direncanakan beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibukota negara pada Pidato Kenegaraan di DPR tanggal 16 Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman lokasi pembangunan ibukota pada tanggal 26 Agustus 2019 (Ihsanuddin, 2019). Sebagian kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih menjadi lokasi baru pembangunan ibukota negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas (2019) memaparkan bahwa ada beberapa faktor mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibukota negara, diantaranya bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami, berada dekat dengan dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, aksesibilitas bandara dan pelabuhan yang memadai, infrastruktur jalan yang memadai (Jalan Trans Kalimantan dan Tol Balikpapan-Samarinda), ketersediaan lahan pemerintah yang luas, ketersediaan sumber air, kemampuan tanah menahan konstruksi bangunan dan bebas banjir, didukung oleh sektor pertahanan, dan struktur penduduk yang heterogen dan terbuka terhadap pendatang.

Pembangunan ibukota negara direncanakan akan mengusung konsep *forest city*, di mana ruang terbuka hijau minimal seluas 50% dari luas kota dan terintegrasi dengan bentang alam yang ada meliputi kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, ibukota negara juga akan memanfaatkan energi terbarukan dan rendah karbon, serta menerapkan efisiensi dan konservasi energi dengan *green buiding design*. Pengembangan *smart city management*, keberadaan universitas riset dan industri, serta

penunjang sistem transportasi publik juga akan dipersiapkan di ibukota baru ini (Bappenas, 2019).

Sebagian besar kawasan target pembangunan ibukota negara masih berupa ekosistem alami hutan tropis. Dalam perencanaan pembangunannya, sebagai bentuk rekayasa pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan ibukota negara perlu mempertimbangkan kelestarian hutan, termasuk konsep ibukota negara berupa *forest city* sebagai bentuk kesetimbangan ekosistem buatan dan ruang hijaunya. Ruang hijau perkotaan menjadi komponen penting ekosistem perkotaan karena menyediakan banyak layanan lingkungan dan sosial yang berkontribusi pada kualitas hidup di kota. Konsep penataan *forest city* saat ini telah diaplikasikan di Balikpapan. Selain wilayah perkotaan, Balikpapan masih melestarikan daerah penyangga atau hutan lindung kota, yang dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara (Susanto, 2011).

Keberadaan hutan di kawasan ibukota negara akan memberikan berbagai manfaat, terutama manfaat secara lingkungan, diantaranya menjadi kawasan resapan air, kontrol iklim, memperbaiki kualitas udara perkotaan, meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan memiliki nilai properti. Adanya hutan di kawasan perkotaan juga mampu mengurangi banjir, mencegah erosi sebagai akibat curah hujan tinggi dan meningkatkan penyerapan air tanah. Pada kota-kota besar di Amerika Serikat, keberadaan hutan kota mampu memberikan keuntungan \$100 hingga \$400 milyar karena tersedianya air serapan hutan kota untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dan mampu mengurangi biaya pelayanan publik serta menambah pendapatan daerah secara signifikan. Terlebih lagi, secara iklim keberadaan hutan kota sangat baik untuk mengurangi efek panas urban (*urban heat effect*) dan berperan sebagai penyerap karbon yang jika divalusi memiliki nilai yang sangat besar (Young, 2011).

Pemindahan ibukota negara di Indonesia, bukan menjadi yang pertama kalinya di dunia. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Argentina, Brasil, hingga Malaysia juga pernah memindahkan ibukota negaranya dari satu kota ke kota lain. Saat ini, terdapat sekitar 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memiliki rencana untuk memindahkan ibukota negaranya (Richard, 2019). Secara umum, pemindahan ibukota negara di seluruh dunia didasari oleh kepentingan politik dan ekonomi atau kebijakan yang mendukung untuk pemindahan tersebut. Lebih lanjut, pemindahan ibukota negara ini mewakili keinginan untuk membedakan dari ibukota pada zaman kolonial atau menempatkan ibukota pada jantung geografis negara untuk meningkatkan aksesibilitas ke seluruh daerah. Ibukota baru akan berperan sebagai identitas nasional baru atau sebagai strategi untuk meminimalisir dan mencegah gerakan separatis (Moser, 2019).

Keberadaan ibukota negara tentu akan memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan indeks pembangunan manusia, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. Apabila merujuk ke konsep pembangunan kota ideal seperti yang telah disusun oleh Bappenas, pemindahan dan pembangunan ibukota negara harus memperhatikan aspek urbanisasi, di mana orang akan berbondong-bondong datang dan menetap di ibukota negara. Para perencana tata ruang tentu akan membangun kota yang bebas dari pemukiman kumuh dan pembangunan tempat tinggal dibagi berdasarkan klasifikasi sosial dan ekonominya. Apabila aspek urbanisasi tidak diperhatikan dengan hati-hati, maka akan kembali memunculkan masalah dan konflik sosial seperti yang telah terjadi di Jakarta saat ini (Gilbert, 1989).

Dalam membangun kota berkelanjutan (*sustainable city*), terdapat lima aspek yang harus diperhatikan, mulai dari penghidupan (*livelihood*), keberlanjutan lingkungan, bentuk spasial dan infrastruktur, sumber pendapatan dan pemerintahan yang mengatur kehidupan kota (Rasoolimanesh *et al.*, 2012). Salah satu aspek pembangunan ibukota negara yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang memadai tentu akan menggerakkan berbagai sektor yang krusial dalam pembangunan. Beberapa sektor, terutama pendidikan, ekonomi dan kesehatan sangat berpengaruh dalam pembangunan manusia, termasuk bagi yang nantinya akan tinggal di sekitar ibukota negara. Apabila

pembangunan sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat dimaksimalkan, maka dapat dipastikan indeks pembangunan manusia di ibukota negara, Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan dapat meningkat secara signifikan.

Pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional. Terdapat korelasi positif antara indeks pembangunan manusia dengan produk nasional bruto / *gross national product* (GNP) dan produk domestik bruto / *gross domestic product* (GDP) suatu negara. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia, maka negara tersebut akan memiliki pendapatan yang besar secara ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai negara maju (Trabold-Nübler, 1991; Lind, 1992). Keberadaan ibukota negara di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia, terutama pada daerah yang terpencil dan tertinggal. Pembangunan sarana prasarana dapat diprioritaskan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal dengan kawasan urban, sehingga pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara merata.

Terakhir, pembangunan ibukota negara dengan konsep *sustainable city* tentu harus memperhatikan tiga aspek penting dalam keberlanjutan, yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus berjalan seimbang. Kota berkelanjutan harus memiliki kondisi yang sesuai, seperti penggunaan sumber daya yang tepat, proteksi lingkungan alami, penggunaan sumber tidak terbarukan yang tepat, pertumbuhan ekonomi, kepercayaan diri masyarakat, kesejahteraan individu dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Rasoolimanesh *et al.*, 2012). Dengan demikian, rencana pembangunan dan pengembangan ibukota negara dengan konsep *sustainable city* sangat diharapkan dapat dicontoh dan diaplikasi oleh kota-kota lain di Indonesia agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di seluruh Indonesia.

4. Kesimpulan

Pemindahan ibukota negara (IKN) baru ke Provinsi Kalimantan Timur akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan keseluruhan secara signifikan. Banyak fasilitas sarana dan prasarana yang akan dibangun untuk mendukung peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang menjadi tolak ukur dari nilai indeks pembangunan manusia. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi akan semakin tinggi dikarenakan adanya pusat-pusat perekonomian dan bisnis baru yang akan dibangun untuk menunjang mobilitas dan perekonomian ibukota negara. Pengelolaan alam pun juga akan sangat diperhatikan karena pembangunan ibukota negara mengusung konsep (*forest city*). Selain itu, ibukota negara juga akan menjadi parameter dan tolak ukur baru bagi perkembangan dan kemajuan kota-kota lainnya di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah mendukung penulisan penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Andhika Nurul W.: Pendapatan daerah dari SDA: bergantung kepada tambang, migas, perkebunan, corporate semua; income kaltim, hubungan SDA dengan IPM kaltim karena bergantung sama sektor swasta. Apakah IPM kaltim berkaitan dengan pendapatan daerah, abstrak, editing konten paper; Sandy Leo: penambahan infrastruktur apakah berdampak terhadap IPM provinsi ketika ada pemindahan ibukota ke kaltim, kesimpulan, review dan editing format paper; Vinca R. Y.: hubungan SDA dengan IPM kaltim karena bergantung sama sektor swasta, Perubahan infrastruktur untuk aksesibilitas SDA ke masyarakat, Pernyataan bebas plagiarisme, review konten paper; Rani Gustia: introduction, definisi, IPM/HDI dari beberapa sumber, penguraian masalah, apa yang mau dikaji, profiling Kalimantan timur: SDA, IPM, demografis, review konten paper.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menggunakan pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Open Access

©2024. The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- Amalia, R, Dharmawan, A.H., Prasetyo L.B., Pacheco P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 130-139. doi:[10.14710/jil.17.1.130-139](https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139)
- Apriyani, M. (2018). Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2018. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Arinaldo, D., Adiatma, J. C. (2019). *Dinamika Batu Bara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- Azis, I. J. (1994). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bappenas. (2019). *Paparan Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara*.
- Barlian, J. (2012). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Propinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan), 8(1), 7-30.
- BPS Kalimantan Timur. (2019). Retrieved October 15, 2019, from <https://kaltim.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>.
- BPS. (2019). Retrieved October 15, 2019, from https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Booklet-IPM-Metode-Baru.pdf.
- Freire, R. C., Pieruccini-Faria, F., & Montero-Odasso, M. (2018). Are Human Development Index dimensions associated with gait performance in older adults? A systematic review. *Experimental Gerontology*, 102, 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.12.001>
- Gilbert, A. (1989). Moving the capital of Argentina: a further example of utopian planning?. *Cities*, 6(3), 234-242.
- Hadi, S. P., Prabawani, B., & Purnaweni, H. (2018). Environmental and social issues on energy policy in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 73, 4-6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302002>

- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, 1(1), 35-45.
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Journal of Economic & Development*, 5(33), 106–116.
- Ihsanuddin. (2019). Jokowi umumkan lokasi baru ibu kota baru Senin siang ini. Kompas.com: 1 hlm. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/08130121/jokowi-umumkan-lokasi-ibu-kota-baru-senin-siang-ini?page=all>, 16 Oktober 2019, pk. 14.40 WIB.
- Katadata. (2019). Inilah pendapatan asli daerah dua kabupaten calon ibu kota baru Indonesia. Retrieved October 9, 2019, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/inilah-pendapatan-asli-daerah-dua-kabupaten-calon-ibu-kota-baru-indonesia>
- Kuncoro, M., & Idris, A. N. (2015). Mengapa Terjadi Growth Without Development Di Provinsi Kalimantan Timur? *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 172. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.323>
- Kusnandar, V. B. (2019). Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Terbesar di Indonesia Databoks. Retrieved October 10, 2019, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/30/dana-bagi-hasil-sumber-daya-alam-kalimantan-timur-terbesar-di-indonesia>
- Lind, N. C. (1992). Some thoughts on the human development index. *Social Indicators Research*, 27(1), 89–101.
- Martínez-Guido, S. I., González-Campos, J. B., & Ponce-Ortega, J. M. (2019). Strategic planning to improve the Human Development Index in disenfranchised communities through satisfying food, water and energy needs. *Food and Bioproducts Processing*, 117, 14–29. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2019.06.007>
- Moser, S. (2019). Capital cities: Varieties and patterns of development and relocation, by Vadim Rossman. *Journal of Urban Affairs*, 41(4), 0-0. DOI: [10.1080/07352166.2018.1522906](https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1522906).
- Mubyarto. 2005. *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional*. PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta.
- Nurbaya, S. (2019). Perspektif Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara. Dialog Nasional Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/PERSPEKTIF_LINGKUNGAN_HIDUP_DLM_RENCANA_PEMINDAHAN_IKN_edit4_share.pdf
- Qiu, Q., Sung, J., Davis, W., & Tchernis, R. (2018). Using spatial factor analysis to measure human development. *Journal of Development Economics*, 132, 130–149. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.12.007>
- Rasoolimanesh, S. M., Badarulzaman, N. & Jaafar, M. (2012). City Development Strategies (CDS) and Sustainable Urbanization in Developing World. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 36, 623–631.
- Rasoolimanesh, S. M., Badarulzaman, N., Abdullah, A., & Behrang, M. (2019). How governance influences the components of sustainable urban development? *Journal of Cleaner Production*, 238. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117983>
- Richard, K.S. (2019). Capital city relocation: countries that have moved their governments. ThoughtCo.: 1 hlm. Retrieved Oktober 16, 2019, from <https://www.thoughtco.com/capital-city-relocation-1435389>.
- Safutra, I. (2019). Pembangunan Ibu Kota Baru Jangan Sampai Merusak Hutan di Kaltim. Retrieved October 10, 2019, from <https://www.jawapos.com/infrastruktur/04/09/2019/pembangunan-ibu-kota-baru-jangan-sampai-merusak-hutan-di-kaltim/>
- Saragih, B. (2018). Tugas Berat Gubernur Kaltim 2018, Menghindarkan Rakyat Dari Kutukan Sumberdaya Alam. Retrieved October 10, 2019, from <https://kaltim.tribunnews.com/2018/06/22/tugas-berat-gubernur-kaltim-2018-menghindarkan-rakyat-dari-kutukan-sumberdaya-alam?page=all>

- Sina, A. I., & Farida, L. E. (2018). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 3, 34–42.
- Sitorus, B., Sitorus, T. I. H., & Subandi, S. (2017). Peningkatan Jaringan Transportasi Di Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Aksesibilitas Wilayah. *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i1.136>
- Susanto, N. N. (2011). Kehadiran Belanda dan Tata Kota Balikpapan. *Naditira Widya*, 5(1), 46-59.
- Trabold-Nübler, H. (1991). The human development index—A new development indicator? *Intereconomics*, 26(5), 236–243.
- Tunas Nusa Edu-Foundation. (2018). Rentang Sejarah Balikpapan. Indonesia Cities Reasearch, Tunas Nusa Edu-Foundation. Retrieved October 9, 2019, from <http://tunasnusa.org>
- UNDP. (2019). Human Development Index. United Nation of Development Program. Retrieved October 10, 2019, from <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 359. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1444>
- Widayati, E. (2017). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktivitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000-2008. *Media Ekonomi*, 18(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.8>
- Yakunina, R. P., & Bychkov, G. A. (2015). Correlation Analysis of the Components of the Human Development Index Across Countries. *Procedia Economics and Finance*, 24, 766–771. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00692-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00692-9)
- Young, R. F. (2011). Planting the living city: Best practices in planning green infrastructure - Results from major U.S. cities. *Journal of the American Planning Association*, 77(4), 368–381.
- Yulian B.E., Dharmawan A.H., Soetarto E., Pacheco P. (2017). Dilema nafkah rumahtangga pedesaan sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 242-249.
- Yuliani, T. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8(1): 1-88. doi: [10.15294/jejak.v7i1](https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1).
- Zaini, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Sumberdaya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(2), 111–130. <https://doi.org/10.24258/jba.v13i2.309>

Biografi Pengarang

Andhika Nurul Wahidah, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: Andhika.Nurul@Ui.Ac.Id
- Orcid: N/A
- Web of Science Researcher id: N/A
- Scopus Author Id: N/A
- Homepage: N/A

Sandy Leo, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: N/A
- Orcid: N/A
- Web of Science Researcher id: N/A
- Scopus Author Id: N/A
- Homepage: N/A

Vinca R.Y., Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: N/A
- Orcid: N/A
- Web of Science Researcher id: N/A
- Scopus Author Id: N/A
- Homepage: N/A

Rani Gustia, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: N/A
- Orcid: N/A
- Web of Science Researcher id: N/A
- Scopus Author Id: N/A
- Homepage: N/A